

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara bisa dikategorikan menjadi negara agraris jika sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani yang mengolah lahan pertanian tersebut. Negara Indonesia sudah termasuk dalam kategori negara agraris karena kebanyakan penduduknya menggeluti pekerjaan di sektor pertanian sebagai petani atau bercocok tanam. Adapun jumlah penduduk Indonesia yang menggeluti pekerjaan dibidang pertanian mencapai angka 38,07 juta jiwa. Di samping itu pemerintah juga mencantumkan anggaran subsidi pupuk yang dilakukan secara bertahap. Anggaran pupuk dari tahun 2020-2024 tergolong mengalami penurunan secara tajam dibandingkan anggaran pada tahun 2015-2020 yang setiap tahunnya hampir mencapai 29,45 triliun per tahun nya. Sedangkan untuk tahun ini anggaran nya hanya mencapai angka 24 triliun saja. Sebagai negara agraris, sektor pertanian Indonesia menghasilkan bermacam-macam komoditas yang banyak dikagumi di pasar dunia. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, tentunya dapat mendongkrak perekonomian terhadap negara.²

Berbicara mengenai sektor pertanian pastinya kita berpikir sektor tersebut merupakan sektor yang sangat geografis mengapa demikian mengingat kembali potensi sumber daya alam (SDA) yang di miliki Indonesia ini sangat melimpah ruah. Seperti contohnya kabupaten Demak yang menduduki peringkat kedua se-Jawa Tengah sebagai daerah penghasil bawang merah terbanyak setelah kabupaten brebes. Terdapat lima kecamatan utama penghasil bawang merah terbanyak meliputi kecamatan Mijen, Karanganyar, Wedung, Demak dan Dempet. Dari kelima kecamatan tersebut kecamatan Mijen menduduki peringkat pertama dalam lingkup kabupaten Demak dengan memiliki luas sawah paling besar diantara kecamatan yang lain yaitu seluas 3.303ha.³

Kecamatan Mijen mencakup 15 desa yang mana Desa Banteng Mati termasuk kedalamnya. Desa Banteng Mati merupakan tempat yang dijadikan tempat penelitian, karena desa tersebut

² Bambang Sumiarto dkk, *Pemikiran Guru Besar Universitas Gadjah Mada Menuju Indonesia Maju 2045: Bidang Agro* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 8.

³ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/demak-penghasil-bawang-merah-terbesar-kedua-se-jawatengah/#:~:text=DEMAK%20%E2%80%93%20Sejak%20tahun%201970%20Dan,menghasilkan%20423.466%20kuintal%20bawang%20merah.>

sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Adapun yang melandasi peneliti memilih desa tersebut dijadikan obyek penelitian yaitu kebanyakan petani sudah mempunyai akses untuk membeli pupuk subsidi yaitu melalui kartu tani. Namun masih ada yang belum memiliki akses tersebut karena dalam proses pembuatannya ada dua cara yaitu dengan melalui kelompok tani (gabung kedalam kelompok tani desa tersebut) atau mengajukan sendiri ke pemerintah desa atau tidak melalui kelompok tani. Pertanian di desa tersebut sangatlah besar, oleh sebab itu dengan kekayaan yang dimiliki tidak lepas dari pemberdayaan yang ada seperti adanya ketersediaan pupuk, benih lahan dan sebagainya.⁴

Pupuk ialah satu dari banyaknya aspek penting dalam kegiatan di sektor pertanian, dimana dalam kegiatan pertanian adanya pupuk tersebut yang menjadikan tumbuhan-tumbuhan para petani itu sendiri jauh lebih baik dibandingkan menanam tumbuhan apapun itu tanpa pupuk, sebab itulah yang menjadikan alasan betapa pentingnya pupuk bagi tumbuhan. Untuk saat ini masih sulitnya untuk mendapatkan pupuk dikarenakan mahalnya harga pupuk yang dijual dipasaran, alasan tersebut yang akan menjadikan meningkatkan biaya yang lebih disektor pertanian. Problematika tersebut yang menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan distribusi pupuk, dimana harapan adanya kebijakan tersebut dapat dijangkau oleh seluruh petani terlebih lagi kalangan menengah kebawah.⁵

Unsur penting dalam sektor pertanian saat ini ialah pupuk. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini gencar mendorong para petani guna meningkatkan penggunaan pupuk yang lebih efisien lagi melalui beberapa kebijakan dalam aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun melalui harga subsidi itu sendiri. Dengan tersedianya pupuk di lapangan merupakan langkah yang sangat membantu para petani untuk menjalankan pekerjaannya di sektor pertanian. Selain itu, dengan memperhatikan kebutuhan pupuk bersubsidi yang terkesan selalu kurang dalam hal distribusinya terlebih lagi pada praktek lapangannya yang kurang memuaskan betapa pentingnya untuk memperhatikan hal tersebut karena pentingnya peranan pupuk dalam

⁴ Nur Moh. Basuki, "Persepsi Petani (Pengguna Kartu Tani) Terhadap Kebijakan Program Kartu Tani Di Kecamatan Batang Batang Sumenep," *Seminar Nasional Optimalisasi Sumber Daya Lokal Era Revolusi 4.0*, 406.

⁵Riki dkk, "Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Subsidi Di Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang," *Journal of law, Administration, and Social Science* (2022): 122.

sektor pertanian dan juga dalam menjaga ketahanan pangan nasional.⁶

Faktor yang menjadikan penghambat para petani dalam melakukan pekerjaannya yaitu adanya keterlambatan suplai dan kelangkaan pupuk hal tersebut yang menimbulkan keresahan di kalangan petani. Selain itu juga dengan melambungannya harga pupuk dan pestisida yang signifikan dan ditambah lagi dengan langkanya pupuk subsidi dari pemerintah yang menjadikan penderitaan petani semakin menjadi-jadi. Permasalahan semakin bertambah dengan melonjaknya permintaan akan pupuk subsidi yang tinggi dan diiringi dengan stok yang terbatas, membuat para petani semakin kebingungan.⁷

Efek dari keterlambatan pupuk subsidi tersebut tidak sedikit dari petani beralih dengan memilih untuk menggunakan pupuk non subsidi. Hal tersebut ditempuh karena dalam pemasaran pupuk non subsidi ini jarang mengalami hambatan ataupun keterlambatan suplay. Selain itu juga penyediaan pupuk non subsidi ini terlampaui lebih banyak stok di pasaran dibandingkan dengan pupuk subsidi. Meskipun demikian harga yang dipatok untuk mendapatkan pupuk non subsidi jauh lebih mahal dibandingkan pupuk subsidi. Para petani mau tidak mau harus mengambil langkah tersebut dengan mengorbankan untuk membeli pupuk yang lebih mahal guna menjaga keberlangsungan hidupnya.⁸

Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani ataupun petani. Pengawasan dilaksanakan agar penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada yang berhak mendapatkan dengan kata lain tepat sasaran. Kalau langkah pengawasan tidak dilakukan dengan baik atau sama sekali tidak maka akan mustahil penyaluran pupuk bersubsidi tersebut secara tepat sasaran.⁹

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Mufidah, Indah Prabawati dengan judul *“Impelementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo”* menunjukkan bahwa

⁶ Sugiono dkk, “Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dengan Acuan Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis,” *Al-kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* (2023): 373.

⁷ Ade Candra, *Pertanian Indonesia Masalah, Solusi, Peluang Bisnis dan Budidaya Praktis* (Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2022), 1.

⁸ Amruddin dkk, *Kelembagaan Agribisnis* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 34.

⁹ Rofyanto Kurniawan dkk, *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 108.

penerapan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani masih belum memenuhi ukuran keberhasilan. Hal ini dibuktikan dengan temuan di lapangan yaitu pemegang Kartu Tani sekaligus pemilik warung masih menggunakan mekanisme lama penebusan pupuk bersubsidi karena beberapa kendala seperti Kartu Tani masih berstatus tidak aktif, mesin EDC belum bisa membaca alokasi pupuk bersubsidi, dan beberapa petani merasakan mekanisme penebusan baru pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani lebih rumit sehingga tujuan dari program distribusi pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani masih belum tercapai. Namun, mekanisme baru dari RDKK berbasis elektronik yang merupakan langkah awal program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu Tani cukup membantu pelaksana program dalam hal penyesuaian dan pemantauan data.¹⁰

Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah mengupayakan berbagai cara guna menemukan titik terang agar permasalahan yang ada cepat terselesaikan, seperti halnya dengan peluncuran program kartu tani. Program ini merupakan langkah terobosan yang dilakukan pemerintah yang diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan pupuk bagi para petani terlebih lagi saat memasuki waktu tanam. Adapun pengertian dari kartu tani sendiri yaitu kartu atau alat transaksi yang dikeluarkan perbankan kepada para petani agar dapat dimanfaatkan dalam proses transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi. Sistem kerja kartu tani seperti halnya alat transaksi pada umumnya dalam lingkup perbankan. Setiap petani melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi maka akan secara otomatis akan mengurangi kuota pupuk bersubsidi yang dimilikinya atau saldo rekening tabungan milik petani.¹¹

Program terobosan ini dapat berjalan secara efektif, karena adanya peran dari kelompok tani itu tersendiri dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan bantuan dari penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani, dan instansi terkait lainnya yang bekerja sama dalam penyuksesan program tersebut. Kartu tani juga memiliki tujuan yang dinyatakan oleh biro infrastruktur dan sumber daya alam (SDA) setda provinsi Jawa Tengah, dengan adanya kartu tani maka terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan asas enam tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga) serta pemberian layanan perbankan pada petani. Dalam pendistribusian

¹⁰ Nur Mufidah, Indah Prabawati, "Impelementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," 7.

¹¹ Abdul Halim, *Kartu Tani Dan Pupuk Bersubsidi Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani Di Kabupaten Maros* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), 14.

kartu tani di Jawa Tengah sudah mencapai angka 2.147.454 dibalik angka tersebut petani kabupaten Demak sudah mencapai presentase 96 persen terdaftar kartu tani. Akan tetapi masih ada kartu tani yang belum didistribusi hingga mencapai angka 81.385. Adapun sasaran kartu tani bagi petani sendiri yaitu adanya kepastian ketersediaan saprotan bersubsidi atau non subsidi.¹²

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andaru Hardiannursholeh, Tutut Suryaningsih dengan Judul “*Analisis Efektifitas Dan Dampak Pengadaan Kartu Tani Di Desa Karanganom kecamatan Kauman Kabupaben Tulungagung*” Kartu tani merupakan wujud dari strategi pengendalian pemerintah terhadap Pupuk bersubsidi, tingkat efektivitas program kartu tani di Desa Karanganom masih rendah. Selain itu, fasilitas pelaksanaannya berupa pupuk bersubsidi belum di sediakan sehingga kartu tidak dapat digunakan. Sampai saat ini dampak yang dirasakan petani masih negatif karena kartu tersebut masih belum bisa berfungsi, petani merasa ribet dan bingung dengan kartu tani ini.¹³

Pemerintah membuat terobosan program kartu tani guna memgedepankan kesejahteraan para petani dalam memudahkan pekerjaannya. Jika dilihat dari segi pandang ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang mempunyai tujuan guna mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Adapun salah satu bentuk kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan konteks industri yaitu meningkatnya kesejahteraan petani atau perajin ketika bahan baku dapat dihargai dengan harga yang baik. Sedangkan ada juga prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yang ada kaitanya dengan maqashid syariah. Seperti kegiatan dalam lingkup produksi harus dilandasi dengan nilai-nilai dalam Islam dan juga sesuai dengan maqashid syariah, selain itu tidak diperbolehkan memproduksi barang ataupun jasa yang bertentangan dengan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kegiatan produksi juga harus mementingkan beberapa aspek seperti halnya keadilan, sosial zakat, sedekah, infak dan zakat. Kegiatan produksi juga harus memperhatikan dalam kegiatan prioritasnya seperti halnya harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu dlaluriyat, hajiyat dan yang terakhir tahsiniyat.¹⁴

¹² Agustono dkk, *Meninjau Kebijakan Impor Beras* (Yogyakarta: CV. Absolute Media 2020), 72.

¹³ Andaru Hardiannursholeh, Tutut Suryaningsih, “Analisis Efektifitas Dan Dampak Pengadaan Kartu Tani Di Desa Karanganom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung,” *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, (2022): 89.

¹⁴ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2014), 128.

yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. Al-An’am 6:82)¹⁷

Kesejahteraan sosial yang digariskan oleh Al-Qur’an meliputi kondisi aman (jauh dari gangguan, baik alam fisik maupun sosial) dan juga relasi harkmonis antar sesama manusia, sehingga manusia dapat menjalankan fungsi sosial dari segi pandang kekhilafahnya. Adapun pengertian dari kesejahteraan sosial yaitu kebutuhan semua manusia, namun tidak semuanya mendapatkan secara mudah baik dari faktor internal maupun faktor eksternalnya manusia tersebut. Ada juga dimensi kesejahteraan meliputi fisik, badan dan juga spiritual. Beberapa langkah untuk menuju kesejahteraan sosial agar tercapai bilamana masing-masing individu atau masyarakat memiliki kebutuhan untuk memperbaiki masyarakat dan lingkungannya, bukan juga merusak, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik.¹⁸

Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan diatas. Penelitian ini memiliki judul **“Analisis peranan pengadaan kartu tani guna menjamin ketersediaan pupuk subsidi dalam perspektif ekonomi syariah (studi kasus Desa Banteng Mati Mijen Demak)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, mengingat pembahasan tersebut sangatlah luas, oleh karena itu agar peneliti lebih fokus maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan dibahas. Tentu saja yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas oleh peneliti yaitu mengenai **“Analisis peranan pengadaan kartu tani guna menjamin ketersediaan pupuk subsidi dalam perspektif ekonomi syariah (studi kasus Desa Banteng Mati Mijen Demak)”**. Maka fokus peneliti disini membahas mengenai peranan kartu tani yang bertujuan menjamin ketersediaan pupuk subsidi demi kesejahteraan petani tetap diperhatikan melalui ajaran agama Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengadaan kartu tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Banteng Mati?
2. Bagaimana peranan pengadaan kartu tani guna menjamin ketersediaan pupuk subsidi dalam perspektif ekonomi syariah?

¹⁷ Kementerian Agama RI, 2015, 138.

¹⁸ Waryono Abdul Ghafur dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), 8.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan kartu tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Banteng Mati
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan pengadaan kartu tani guna menjamin ketersediaan pupuk subsidi dalam perspektif ekonomi syariah

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
Hasil penelitian yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menambah wawasan dan juga literasi sekaligus bisa dijadikan referensi bagi peneliti lain yang membahas mengenai peranan pengadaan kartu tani untuk menjamin ketersediaan pupuk subsidi menurut pandangan ekonomi syariah.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi petani
Adanya penelitian ini diharapkan mampu guna memberikan edukasi atau wawasan kepada para petani terkait dengan penggunaan kartu tani yang telat untuk mendorong efisiensi dibidang pertanian.
 - b. Bagi pemerintah desa
Adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan petani dan juga kartu tani itu sendiri agar kesejahteraan petani dapat tercapai

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan penulis susun adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal
Dalam bagian awal ini terdiri dari cover atau halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel atau daftar gambar.
2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang deskripsi, teori yang terkait dengan penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian serta pembahasan tentang peranan pengadaan kartu tani guna menjamin ketersediaan pupuk subsidi dalam perspektif ekonomi syariah

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.